

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Mahrus. (2011). *Dasar – Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amrani, Hanafi dan Mahrus Ali. (2015). *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Chazawi, Adami. (2007). *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Deliarnoor, N. A. dan Sigid Suseno. (2015) *Tindak Pidana Khusus*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Efendi, Jonaedi, (2016). dkk. *Kamus Istilah Hukum Populer*. Jakarta: Kencana.
- Farid, Andi Zainal A. (2007). *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi. (2006). *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*. Jakarta: Ragunan.
- Kanter, E. Y. dan S.R. Sianturi. (2002). *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Storia Grafika
- Marzuki, Peter Mahmud. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Moeljanto. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineke Cipta.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. NTB: Mataram University Press.
- Manan, Bagir.(2004). *Hukum positif indonesia: satu kajian teoritik*. Yogyakarta:FH UII Press.
- Mertokusuma, Sudikno. (2017). *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty
- Muhammad, Abdulkadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

- Poerwadarminta, W. J. S. (2005). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka.
- Saleh, Roeslan. (2002). *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Satria, Hariman. (2004). *Anatomi Hukum Pidana Khusus*. Yogyakarta: UII Press.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. (2003). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tujuan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Sugiarto, R. Toto. (2021). *Arti Korupsi dan Ciri-Ciri Korupsi*. Yogyakarta: Hikam Pustaka.
- Sudarto. (2009). *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto.
- Syamsiah, T. N. (2011). *Tindak Pidana Perpajakan*. Bandung: Alumni.
- Syamsudin, Asiz. (2011). *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Jurnal

- Wijana, K., Sepud, I. M., & Anak Agung Sagung Laksmi Dewi. (2020). Peradilan Tindak Pidana Korupsi Bagi Anggota Militer. *Jurnal Analogi Hukum*. 2(3). 404-408. Doi: <https://doi.org/10.22225/ah.2.3.2494.404.408>
- Emmanuel, J., Nyaman Serikat Putra J., & Umi Rozah. (2019). Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Anggota TNI Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 363/K/MIL/2017). *Jurnal Hukum Diponegoro*. 8(3). 2096-2116. Doi: <https://doi.org/10.14710/dlj.2019.24578>
- Poli, Rima Katherina. (2017). Pertanggungjawaban Bagi Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Gratifikasi. *Lex Privatum*. 5(10). 19-26.
- Hattu, Yakub & Astuti Nur Fadillah. (2023). Penyidikan Terhadap Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum Lutur*. 4(2). 81-91. Doi: <https://doi.org/10.30598/lutur.v4i2.10633>

C. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer. (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 84)

Indonesia. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Lembar Negara Tahun 1999 Nomor 140)

Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Lembar Negara 2001 Nomor 134)

Indonesia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. (Lembar Negara Tahun 2002 Nomor 137).

Indonesia. Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembar Negara Tahun 2004 Nomor 127)

Indonesia. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. (Lembar Negara Tahun 2009 Nomor 155).

Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (Lembar Negara Tahun 2023 Nomor 1).

Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undnag-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 832)

Indonesia. Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 Tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia.

D. Internet

BBC News. TNI Berkeras Dugaan Korupsi Kabasarnas Diadili Di Ppengadilan Militer, Pengamat: 'ini akan hidupkan anggapan anggota TNI warga negara kelas satu'. Diakses pada tanggal 18 November 2023 dari <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c1rzzjgn0ljo>.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 363 K/MIL/2017, Diakses pada tanggal 18 November 2023 dari

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/dba3efbe7cd04de13eccd365df254c6b.html>.